

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BALANTAK**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2018**

**KECAMATAN BALANTAK
2019**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai pada tahun mendatang.

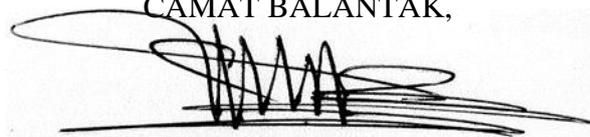
Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, untuk itu sangat kami harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini pada tahun-tahun mendatang.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam pembuatan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat dimasa mendatang, Aamiin.

Balantak, Januari 2019

CAMAT BALANTAK,



KURNIA CHANDRA, SH
NIP. 19690605 199403 1 016

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	3
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	5
C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	7
BAB III : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Program dan Kegiatan	12
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
C. Penghargaan	17
D. Permasalahan dan Solusi	17
E. Capaian Kinerja	17
BAB IV : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN...	19
BAB V : PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana secara teknis dan substansi penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Kecamatan Balantak adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Balantak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah

- A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

- A. Program dan Kegiatan
- B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- C. Penghargaan
- D. Permasalahan dan Solusi
- E. Capaian Kinerja

Bab IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

- A. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain
- B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh Desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Balantak menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

Kecamatan Balantak dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Balantak mempunyai fungsi:

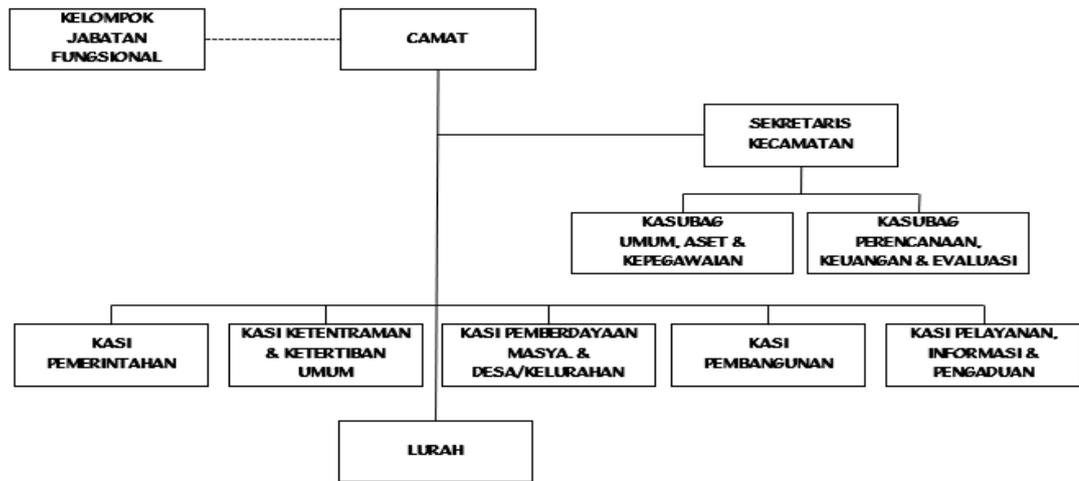
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balantak, Susunan Organisasi Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balantak sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Balantak



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Balantak didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	ngkat/Golongan	SMP	SMA	D3/D2	S1	S2	Jumlah
1.	Pegawai / PNS	1	14	1	23		39 orang
	Jumlah		14	1	23		39 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak 2018

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Balantak
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	-	-	-
2.	Golongan IV/a	1	1	1
3.	Golongan III/d	1	2	3
4.	Golongan III/c	3	3	6
5.	Golongan III/b	-	9	9
6.	Golongan III/a	1	1	2
7.	Golongan II/d	-	-	-
8.	Golongan II/c	4	4	8
9.	Golongan II/b	2	3	5
10.	Golongan II/a	1	2	3
11.	Golongan I/c	1	-	1
Jumlah		14	25	39 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balantak 2018

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balantak dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut untuk tahun 2018 sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Balantak Tahun 2018

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Printer dot Matrix	1	√	
2	Printer injekt	4	√	
	Meja Panjang	1	√	
3	Kursi Lipat	20	√	
4	Lap Top	2	√	
5	Komputer PC	4	√	
6	AC 2 PK	2	√	
7	AC 1 PK	3	√	
8	Dispenser	6	√	
9	Lemari Arsip	5	√	
10	Gorden	1	√	
11	Sepeda Motor	3	√	
12	Mesin Absen	4	√	

Sumber : Data Aset Kecamatan Balantak 2018

C. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balantak yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan.

Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu :**“Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran yaitu Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang; dan
- Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan formula pengukuran yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan yang berbasis kearifan Lokal.

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Balantak menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balantak

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	75	77	80
		2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	346	347	348	349	350

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Balantak. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Balantak tahun 2016 – 2021 sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2018, dimana Program dan Kegiatan Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Meubelair
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

e. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan

1. Pengembangan Nilai Budaya Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan
4. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat Kecamatan

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah alokasi anggaran Rp. 560.417.000,- realisasi keuangan Rp. 556.139.000,- mencapai persentase 99,24% yang dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.4.176.000,- realisasi keuangan Rp.4.176.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya materai sebanyak 1.360 Lembar.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 10.750.000,- mencapai persentase sebesar 71.66% dengan hasil berupa tersedianya jaringan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik di kecamatan Balantak.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 36.200.000,- realisasi keuangan Rp. 36.200.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya petugas kebersihan kantor.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 23.983.000,- realisasi keuangan Rp. 23.980.000,- mencapai persentase sebesar 99.98% dengan hasil berupa tersedianya Alat Tulis Kantor.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 23.153.000,- realisasi keuangan Rp. 23.153.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 11.000.000,- realisasi keuangan Rp. 11.000.000,- mencapai persentase sebesar 100%.
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 71.625.000,- realisasi keuangan Rp. 71.605.000,- mencapai persentase sebesar 99.97% dengan hasil berupa tersedianya Makanan dan Minuman .
 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 78.000.000,- realisasi keuangan Rp. 77.995.000,- mencapai persentase sebesar 99.99% dengan hasil berupa terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 88.000.000,- realisasi keuangan Rp. 88.000.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 10. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 209.280.000,- realisasi keuangan Rp. 209.280.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran dan Tenaga Keamanan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah alokasi anggaran Rp. 380.908.450,- realisasi keuangan Rp. 346.114.143,- mencapai persentase 90.86% yang dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan Dinas Operasional, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.54.890.000,- realisasi keuangan Rp.54.059.143.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya kendaraan Dinas Operasional sebanyak 2Unit.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 61.824.000,- realisasi keuangan Rp. 61.300.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor .
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 178.246.850,- realisasi keuangan Rp. 144.950.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Peralatan Gedung Kantor
- 4) Pengadaan Meubelair, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.972.600,- realisasi keuangan Rp.32.830.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Meubelair Gedung Kantor sebanyak 20 Unit.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi keuangan Rp.25.000.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 21.600.000,- realisasi keuangan Rp. 21.600.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa terlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 7 unit.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan Rp. 1.500.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor .

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.875.000,- realisasi keuangan Rp. 4.875.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebanyak 12 unit.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah alokasi anggaran Rp. 42.150.000,- realisasi keuangan Rp. 42.150.000,- mencapai persentase 100% yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 27.750.000,- realisasi keuangan Rp. 27.750.000,- mencapai persentase sebesar 100%dengan hasil berupa tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebanyak 39 Orang.
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi keuangan Rp. 14.400.000,- mencapai persentase sebesar 100% dengan hasil berupa tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebanyak 39 orang.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Jumlah alokasi anggaran Rp. 22.464.550,- realisasi keuangan Rp. 22.459.880,- mencapai persentase 99.97% yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.152.000,- realisasi keuangan Rp. 3.152.000,- mencapai persentase sebesar 100%dengan hasil berupa tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak.
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.326.811,- realisasi keuangan Rp. 3.326.760,- mencapai persentase sebesar 100%dengan hasil

berupa tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak.

- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15.985.739,- realisasi keuangan Rp. 15.981.120,- mencapai persentase sebesar 100%dengan hasil berupa tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Balantak.

3. PENGHARGAAN

Untuk Tahun 2018 penghargaan yang diterima oleh Kecamatan Balantak belum ada.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang ditemui antara lain :

- Masih banyak permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan Balantak yang belum terakomodir lewat dana APBD Provinsi serta APBD Kabupaten setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Kecamatan Balantak hanya diperuntukkan kegiatan rutin/operasional Kantor Camat Balantak bukan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di Kecamatan Balantak.
- Sumberdaya Aparatur di Kecamatan Balantak Masih minim sehingga dalam penyusunan perencanaan dikecamatan masih mengalami kesulitan

Solusi penyelesaian Permasalahan yaitu :

- Perlu adanya pelimpahan kewenangan sehingga intervensi anggaran untuk kecamatan diperuntukkan untuk penyelesaian permasalahan.
- Perlunya penempatan pegawai yang memiliki sumber daya yang memadai.

5. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Balantak Tahun 2018 dapat digambarkan lewat tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Balantak Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	72%
2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	340	340

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Balantak Tahun 2018 mencapai 100%.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas wilayah Desa dan Kecamatan

Pada umumnya permasalahan batas wilayah timbul dilatar belakangi beberapa faktor salah satunya potensi ekonomis yang berada di sekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996.

a. Batas Desa

Untuk Batas Desa, belum adanya penetapan dan penegasan batas secara permanen, namun upaya-upaya penetapan dan penegasan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Balantak pada tahun 2018 dengan melakukan sosialisasi penegasan tapal batas desa. Sementara penegasan Tapal Batas di desa diwilayah Kecamatan Balantak ditargetkan tahun 2020 Desa telah memiliki batas wilayah yang permanen.

b. Batas Kecamatan

Batas Kecamatan merupakan bagian dari batas Desa. Sengketa batas Desa yang saling berbatasan namun berbeda kecamatan merupakan bagian dari sengketa batas kecamatan.

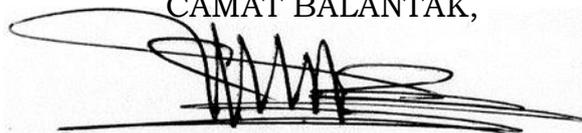
BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Balantak sangat ditentukan oleh komitmen serta keterlibatan aktif segenap komponen baik dari aparatur sipil negara, Kepala Desa bersama Perangkat maupun masyarakat Kecamatan Balantak. Harus disadari bahwa dibalik capaian ini, sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang masih perlu dibenahi dan ditangani. Oleh karenanya, sinergitas antara semua pihak perlu diwujudkan, agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ke depan dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bagi masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Tahun Anggaran 2018 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima Kasih.

Balantak, Januari 2019

CAMAT BALANTAK,



KURNIA CHANDRA, SH

NIP. 19690605 199403 1 016

